

Nama : Napalin Fri Angine-F.

NPM : 251061075

Kelas : PSTI-B

Bagian I

1.) 1.) Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, dalam kenyataannya, ketidakseimbangan antara keduanya masih menjadi persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama ketika para pejabat cenderung lebih mendahulukan hak daripada menjalankan kewajiban mereka terhadap rakyat.

UUD 1945 telah mengaturnya melalui beberapa pasal :

- Pasal 27 ayat 1

Menegaskan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, sekaligus wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

- Pasal 27 ayat 2

Menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang secara implisit mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja dan jaminan kesejahteraan.

- Pasal 28

Mengatur hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai fondasi demokrasi, sekaligus mengandung kewajiban untuk menggunakannya secara bertanggung jawab.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Ketika hak masyarakat tidak terpenuhi atau kewajiban diabaikan, kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun dan berpotensi memicu konflik sosial. Karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.) Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara serta memastikan masyarakat dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Peran tersebut dilakukan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang sesuai dengan UUD 1945.

- Pasal 31

Mengatur kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional.

- Pasal 34

Mengatur kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

- Pasal 28 H

Menjamin hak atas kesejahteraan dan kesehatan.

- Pasal 28 C

Menjamin hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan.

Agar lebih efektif, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan program-program yang dibuat itu tepat sasaran. Dengan demikian, hak warga negara dapat terpenuhi secara lebih merata.

Bagian 2

1.) Persamaan antara kedua era adalah penggunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memengaruhi hasil pemilu. Kondisi ini membuat persaingan politik menjadi kurang adil dan dapat menguntungkan pihak yang sedang berkuasa.

Perbedaannya, pada era Orde Baru kontrol dilakukan secara langsung dan terpusat oleh pemerintah. Sementara itu, pada era sekarang pengaruh tersebut cenderung dilakukan secara lebih halus melalui media, bantuan sosial, atau dukungan dari pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Dampaknya, kualitas demokrasi dapat menurun karena kompetisi politik tidak berlangsung secara setara. Meskipun partisipasi masyarakat meningkat, kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat berkurang apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

2.) Contoh penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu adalah penggunaan bantuan sosial menjelang pemilu, ketidaknetralan aparat, dan dominasi akses media oleh pihak tertentu. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dan mengurangi keadilan dalam proses pemilu.

Untuk memperbaiki kualitas demokrasi, independensi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus terus dijaga.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara perlu diperkuat agar tidak dimanfaatkan untuk politik.

Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi politik dan berpartisipasi secara kritis dalam mengawasi jalannya demokrasi. Dengan demikian, pemilu dapat berlangsung lebih jujur, adil dan demokratis.

Bagian 3

1.) Perbedaan perlakuan hukum dalam kedua kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Korupsi yang dilakukan pejabat memiliki dampak besar bagi masyarakat, namun seringkali mendapatkan hukuman yang dianggap lebih ringan dibandingkan pelanggaran yang dilakukan rakyat kecil.

Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum masih dipandang lebih keras terhadap masyarakat yang lemah secara ekonomi, sementara pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh sering memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun. Masyarakat menjadi ragu apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan berlaku bagi semua warga negara.

2.) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan sehingga penerapannya belum sepenuhnya efektif.

Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya integritas sebagian aparat, pengaruh kekuasaan dalam proses hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran hukum.

Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan integritas aparat, penguatan lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang lebih transparan dan adil.

Bagian 4

1.) Kemajuan teknologi dan media sosial memberikan dampak positif maupun negatif terhadap wawasan nusantara. Generasi muda lebih mudah mengenal budaya luar, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mempelajari budaya Indonesia.

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang sejarah, budaya, dan keberagaman Indonesia melalui media sosial atau platform digital lainnya.

Contohnya, konten budaya daerah dan wisata lokal yang viral dapat meningkatkan rasa bangga terhadap identitas bangsa.

2.) Globalisasi membawa berbagai pengaruh budaya asing yang memengaruhi cara pandang gen Z terhadap identitas nasional. Akibatnya, sebagian generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal.

SIDU

Perbedaan generasi juga berpengaruh karena gen Z lebih banyak memperoleh informasi melalui media digital, sedangkan generasi sebelumnya melalui pendidikan formal dan lingkungan sosial.

Untuk memperkuat wawasan nusantara, Pendidikan kebangsaan perlu dikemas secara kreatif dan didukung oleh pemanfaatan media sosial yang positif.

Bagian 5

1.) Ujaran kebencian dan hoax di media sosial dapat melemahkan ketahanan nasional karena memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Informasi yang tidak benar juga dapat memengaruhi cara berpikir dan sikap masyarakat.

Dalam bidang politik, hoaks dapat meningkatkan polarisasi. Dalam bidang ekonomi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, sedangkan dalam bidang sosial budaya dapat memicu konflik antar kelompok.

Karena itu, penggunaan media sosial yang bijak sangat penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

2.) Pendidikan berperan penting dalam mengajarkan generasi muda menggunakan media sosial secara bijak. Melalui pendidikan, siswa dapat belajar mengenai hoaks, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.

Salah satu program yang dapat diterapkan adalah literasi digital di sekolah untuk melatih kemampuan memverifikasi informasi dan memahami etika bermedia sosial, dan juga dalam mengenali apa itu hoaks.

Program ini memiliki peluang keberhasilan yang besar karena generasi muda sangat dekat dengan teknologi. Namun, masih ada hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan pemahaman literasi digital. Karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan pemerintah.